

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

BUKU

Achmad Ali. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Kencana.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. (2012). Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Kencana.

A.V. Dicey. (1982). Introduction to the Study of the Law of the Constitution (10th ed.). Macmillan.

Bachsan Mustafa. (2001). Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Bagir Manan. (2004). Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik. UII Press.

Bambang Sunggono. (2016). Metodologi Penelitian Hukum. Rajawali Pers.

Barda Nawawi Arief. (2016). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti.

Budi Winarno. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo.

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit. (2009). Kamus Istilah Hukum. Jakarta.

Daniel S. Lev. (1990). Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan. LP3ES.

Djenal Hoesen Koesoemahatmadja. (t.t.). Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Jilid 1. Alumni.

Ernst Utrecht. (1983). Pengantar dalam Hukum Indonesia. Ichtiar Baru.

Esmi Warassih. (2005). Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis. Suryandaru Utama.

- Gustav Radbruch. (1950). *Legal Philosophy*. Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (terj. Kurt Wilk). Harvard University Press.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- H.A.W. Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers.
- Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Hans Kelsen. (1978). *Pure Theory of Law* (terj. Max Knight). University of California Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Lon L. Fuller. (1964). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Lon L. Fuller. (1969). *The Morality of Law (Revised Edition)*. Yale University Press.
- M. Irfan Islamy. (2020). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- MD. Shodiq. (2023). *Budaya Hukum*. MAFI Media Literasi Indonesia.
- Mertus C. Manik. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Moh. Mahfud MD. (2012). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers.

- Moh. Mahfud MD. (2012). Politik Hukum di Indonesia (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Munir Fuady. (2013). Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum. Kencana.
- Ni'matul Huda. (2015). Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Setara Press.
- Ni'matul Huda. (2021). Hukum Pemerintahan Daerah. Nusamedia.
- Otje Salman Soemadiningrat. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris. Alumni.
- Paul Scholten. (2013). Struktur Ilmu Hukum (terj. B. Arief Sidharta). Alumni.
- Paulus Hadisuprpto. (2020). Hukum dan Masyarakat: Kajian Sosiologis Hukum. UNDIP Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2022). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana.
- Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu.
- R.D.H. Koesoemahatmadja. (t.t.). Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Jilid 1. Alumni.
- Riant Nugroho. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik. Elex Media Komputindo.
- Riduan Syahrani. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. (2018). Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Robert B. Seidman. (1978). The State, Law and Development. Croom Helm.
- Roscoe Pound. (1942). Social Control Through Law. Yale University Press.
- Satjipto Rahardjo. (2009). Hukum dan Masyarakat. Angkasa.

- Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2019). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosebroto. (2013). *Hukum: Konsep dan Metode*. Setara Press.
- Solichin Abdul Wahab. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Solichin Abdul Wahab dkk. (2004). *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT Bumi Aksara.
- Sri Hartini dkk. (t.t.). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Edisi Ketiga)*. Cahaya Atma Pustaka.
- Theo Huijbers. (1995). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius.

Tom R. Tyler. (1990). *Why People Obey the Law*. Yale University Press.

Tom R. Tyler. (2006). *Why People Obey the Law (Second Edition)*. Princeton University Press.

Zainuddin Ali. (2006). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.

JURNAL

Barlinti, Y. S. (2023). Budaya hukum dan pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan hukum di Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 10(1). Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Cahyaningrum, D. (2021). Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui program desa/kelurahan sadar hukum. Jurnal Negara Hukum, 12(2). Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. Journal of Conflict Resolution, 2(1). Sage Publications.

Setiyanto, B. (2022). Program desa sadar hukum dalam perspektif pemberdayaan hukum masyarakat. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1). Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sinaga, B. N. P. D. (2021). Kepatuhan hukum sebagai fondasi budaya hukum dalam masyarakat hukum Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 9(2). Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

LAPORAN

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). *Perencanaan pembangunan hukum nasional 2015-2019*. Kementerian Hukum dan HAM.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Pedoman pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum*. Kementerian Hukum dan HAM.